

Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pencegahan Korupsi pada Proyek Konstruksi di Indonesia

Adventina Situmorang¹ Firza Syabilah² Winda Jesica Nainggolan³ Danar Ilyasa Zafin Tanjung⁴ Ahmad Latief Devid Prakoso⁵ Dimas Prasetyo⁶ Muhammad Rifaldi Chery⁷ Sri Yunita⁸

Program Studi Teknik Sipil, Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

Email: adventina.5243250006@mhs.unimed.ac.id¹

firzasyabila.5243250072@mhs.unimed.ac.id² windagolan.5243250016@mhs.unimed.ac.id³

danarilyasa.5243250029@mhs.unimed.ac.id⁴ devidprakoso.5243250015@mhs.unimed.ac.id⁵

pras.5243250028@mhs.unimed.ac.id⁶ faldi.5243250017@mhs.unimed.ac.id⁷

sr.yunita@unimed.ac.id⁸

Abstrak

Korupsi pada sektor konstruksi masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Kompleksitas pekerjaan, nilai anggaran yang tinggi, serta banyaknya pihak yang terlibat menjadikan sektor ini sangat rentan terhadap penyimpangan, seperti pemalsuan dokumen, kolusi dalam tender, hingga penurunan mutu material. Kajian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat berperan dalam upaya pencegahan korupsi pada pekerjaan konstruksi melalui analisis literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila dapat menjadi fondasi moral dalam membangun karakter antikorupsi melalui penerapan nilai kejujuran, tanggung jawab, transparansi, serta orientasi kepentingan umum. Internalisasi nilai Pancasila diperlukan dalam dunia pendidikan, budaya kerja, dan sistem pengelolaan proyek agar praktik korupsi dapat diminimalisir sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, profesional, serta berkeadilan.

Kata Kunci: Pancasila, Korupsi, Konstruksi, Etika Kerja, Tata Kelola

Abstract

Corruption within the construction sector remains a major obstacle that affects the quality of national development. The high level of complexity, large financial allocations, and involvement of multiple stakeholders make this sector highly vulnerable to unethical practices, including document falsification, collusive tender arrangements, and reduction of material standards. This study aims to evaluate the role of Pancasila values in reducing corruption in construction projects through a literature-based analysis. The findings reveal that Pancasila can serve as a moral foundation for shaping anti-corruption behavior through integrity, accountability, transparency, and public-interest orientation. The integration of Pancasila values into education, organizational culture, and project governance is essential to minimize corruption and ensure the implementation of construction projects that are more professional, ethical, and equitable.

Keywords: Pancasila, Corruption, Construction, Professional Ethics, Governance



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu elemen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Proyek konstruksi seperti pembangunan fasilitas publik, jaringan transportasi, gedung pendidikan, serta sarana umum lainnya dirancang untuk memperluas akses pelayanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan nasional. Namun, pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama praktik korupsi yang terjadi pada berbagai tahapan pekerjaan. Korupsi dalam sektor konstruksi muncul akibat lemahnya sistem pengawasan,

adanya celah dalam regulasi, serta mentalitas sebagian pihak yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi dibandingkan tanggung jawab profesional. Dampak dari tindakan tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat membahayakan masyarakat karena menurunnya kualitas hasil konstruksi. Hal ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan aspek hukum dan sanksi administratif semata, tetapi juga membutuhkan pembentukan karakter dan moralitas dalam pelaku sektor konstruksi. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila memiliki peran sebagai pedoman moral dan etika dalam penyelenggaraan pembangunan. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan agar tetap berorientasi pada keadilan, kejujuran, dan kepentingan publik. Penerapan nilai-nilai tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem konstruksi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Tinjauan Pustaka

Tindakan korupsi dalam sektor konstruksi masih menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas di Indonesia. Proyek infrastruktur umumnya melibatkan anggaran dalam jumlah besar, proses perencanaan yang panjang, serta banyak pihak dengan kepentingan berbeda. Kondisi tersebut membuat sektor ini rentan terhadap praktik tidak etis apabila pengawasan dan tata kelola tidak dilaksanakan dengan baik. Bentuk penyimpangan yang sering dijumpai dalam pekerjaan konstruksi antara lain manipulasi dokumen, kolusi dalam proses tender, pengurangan standar material, serta penggelembungan anggaran. Dampak dari tindakan ini bukan hanya kerugian finansial bagi negara, namun juga berpengaruh pada keselamatan publik akibat rendahnya kualitas pekerjaan konstruksi. Di tengah persoalan tersebut, aspek moral dan etika memegang peranan penting. Peraturan dan sistem pengendalian saja tidak cukup apabila tidak didukung oleh integritas dan kesadaran etis para pelaku di sektor konstruksi. Dalam banyak kasus, korupsi tumbuh karena adanya pemberian budaya, seperti anggapan bahwa penyimpangan adalah hal biasa atau bagian dari strategi mendapatkan keuntungan.

Pancasila sebagai dasar pandangan moral bangsa Indonesia memiliki relevansi kuat dalam menjawab persoalan ini. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan landasan pembentukan karakter antikorupsi dan pedoman dalam bekerja secara profesional. Misalnya, nilai Ketuhanan menuntut pekerja menjalankan tugas dengan amanah, nilai Kemanusiaan mengarahkan pekerjaan yang berorientasi pada keselamatan masyarakat, nilai Persatuan menghindarkan praktik nepotisme, nilai Kerakyatan menekankan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan nilai Keadilan Sosial memastikan pembangunan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, internalisasi nilai Pancasila perlu diterapkan secara konsisten dalam kurikulum pendidikan teknik, pelatihan profesional, serta kebijakan tata kelola konstruksi. Integrasi antara etika Pancasila dan sistem pengawasan yang efektif diharapkan mampu menciptakan sektor konstruksi yang lebih bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi literatur, di mana informasi dikumpulkan dari berbagai sumber ilmiah yang relevan seperti jurnal nasional maupun internasional, buku referensi, laporan resmi, serta dokumen akademik yang membahas tema korupsi dalam konstruksi dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada analisis konseptual serta pemetaan teori, bukan pengujian empiris secara langsung di lapangan. Proses analisis dilakukan dengan meninjau, membandingkan, serta menginterpretasikan temuan dari berbagai

sumber untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola korupsi yang terjadi dalam sektor konstruksi serta relevansi nilai Pancasila sebagai upaya preventif. Selain itu, data yang diperoleh juga diseleksi berdasarkan tingkat keterkaitannya dengan fokus penelitian agar hasil kajian dapat tersusun secara sistematis dan argumentatif. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan telaah mendalam yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan strategi pencegahan korupsi berbasis nilai moral, etika profesi, serta tata kelola yang lebih baik di sektor konstruksi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian dari berbagai literatur yang dianalisis, ditemukan bahwa praktik korupsi dalam proyek konstruksi terjadi hampir pada seluruh rantai proses kerja. Penyimpangan tidak hanya muncul pada satu tahapan tertentu, tetapi bersifat sistematis dan berulang dalam setiap fase proyek, mulai dari penyusunan rencana, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan fisik di lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan korupsi sudah mengakar dan memerlukan upaya pencegahan yang komprehensif. Korupsi dalam sektor konstruksi umumnya muncul dalam beberapa bentuk utama, antara lain:

1. Tahap Penyusunan Perencanaan. Pada fase ini, manipulasi sering dilakukan melalui penyusunan kebutuhan proyek yang tidak sesuai realitas, penyalahgunaan data teknis, maupun rekayasa spesifikasi yang menguntungkan pihak tertentu sejak awal. Tindakan ini membuka peluang mark-up biaya maupun penyimpangan lebih lanjut pada tahap berikutnya.
2. Tahap Pengadaan Barang dan Jasa. Proses tender menjadi area dengan risiko korupsi yang tinggi. Praktik umum yang ditemukan meliputi pengaturan pemenang tender, kolusi antar pihak yang berkepentingan, penawaran fiktif, hingga pemberian kompensasi sebagai imbalan untuk memenangkan kontrak proyek.
3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi. Pada tahap pekerjaan fisik, penyimpangan terjadi melalui pengurangan mutu material, volume pekerjaan yang tidak sesuai laporan, rekayasa progres kerja, serta pembayaran yang tidak sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa akar utama terjadinya korupsi bukan hanya kelemahan sistem administratif, tetapi juga rendahnya integritas dan kesadaran moral pelaku di lapangan. Budaya permisif terhadap korupsi juga memperkuat praktik tersebut karena tindakan menyimpang dianggap hal yang umum selama tidak ditemukan oleh pihak pengawas. Dari hasil penelusuran literatur, nilai-nilai Pancasila memiliki posisi strategis dalam membangun karakter dan etika profesi yang berorientasi pada kejujuran dan tanggung jawab. Namun, penerapannya masih perlu diperkuat melalui pendidikan, kebijakan organisasi, serta tata kelola proyek yang konsisten.

Pembahasan

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki relevansi kuat dalam mendorong pembentukan lingkungan kerja yang bebas korupsi dalam sektor konstruksi. Setiap sila memberikan arah moral yang dapat diimplementasikan dalam perilaku profesional, dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ringkasan relevansi nilai Pancasila dalam konteks ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai Ketuhanan. Menanamkan kesadaran bahwa setiap pekerjaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas, sehingga tindakan manipulatif seperti penipuan dokumen, gratifikasi, atau penyalahgunaan kewenangan dapat dihindari.

2. Nilai Kemanusiaan. Menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Praktik seperti pengurangan mutu material atau manipulasi teknis bertentangan dengan prinsip kemanusiaan karena meningkatkan risiko bahaya bagi pengguna fasilitas umum.
3. Nilai Persatuan. Mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam proyek bekerja secara profesional tanpa praktik diskriminatif, nepotisme, maupun kolusi yang dapat merusak prinsip keadilan dan objektivitas.
4. Nilai Kerakyatan. Mendorong proses pengambilan keputusan yang terbuka, demokratis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi pada tahap perencanaan, tender, hingga evaluasi merupakan bentuk penerapan nilai ini.
5. Nilai Keadilan Sosial. Mengarahkan agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata, bukan hanya kelompok tertentu yang memperoleh keuntungan melalui penyimpangan.

Secara keseluruhan, penerapan nilai Pancasila dalam tata kelola proyek konstruksi tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga dapat memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan profesionalitas kerja, serta menciptakan budaya kerja antikorupsi. Dengan penguatan nilai etika yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan konstruksi, praktik korupsi berpotensi ditekan secara signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa korupsi dalam sektor konstruksi masih menjadi persoalan serius dan terjadi di hampir seluruh tahap penyelenggaraan proyek, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan pekerjaan. Penyimpangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi dan pengawasan, tetapi juga merupakan cerminan rendahnya integritas moral dan etika sebagian pelaku pembangunan. Akibatnya, korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian negara, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan masyarakat karena berdampak pada kualitas hasil konstruksi. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting sebagai landasan moral dan pedoman etika dalam pelaksanaan pembangunan. Nilai Ketuhanan menuntun pelaku konstruksi untuk bekerja dengan kejujuran dan tanggung jawab. Nilai Kemanusiaan menekankan pentingnya menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Nilai Persatuan mendorong kerja yang bebas dari praktik kolusi dan nepotisme. Nilai Kerakyatan mengarahkan pengambilan keputusan agar lebih transparan dan akuntabel. Sementara itu, Nilai Keadilan Sosial memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, internalisasi nilai Pancasila harus dilakukan tidak hanya sebatas pemahaman teoritis, tetapi juga melalui pembiasaan dalam praktik, penguatan budaya kerja, serta integrasi dalam kebijakan tata kelola proyek konstruksi. Apabila nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten dan didukung oleh sistem pengawasan yang tegas serta transparan, maka upaya pencegahan korupsi pada sektor konstruksi dapat berjalan lebih efektif, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara profesional, bermartabat, serta berorientasi pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, T. Y. (2020). *Etika profesi teknik dan penerapannya pada proyek konstruksi*. Jurnal Teknik Sipil Indonesia, 12(2), 87–96.
- Anugrah, H. P. (2024). *Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proyek konstruksi yang beretika*. Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, 2(3).
- Ariani, D., & Prasetyo, L. (2021). Penguatan integritas dalam sektor konstruksi melalui nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Integritas Nasional*, 8(1), 45–58.

- Budiarto, A., & Nugroho, R. (2020). Faktor-faktor penyebab korupsi dalam proyek konstruksi pemerintah. *Jurnal Rekayasa Konstruksi*, 6(1), 12–23.
- Firmansyah, H. (2022). Sistem pengadaan barang dan jasa sebagai instrumen pencegahan korupsi. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 9(3), 140–152.
- Handayani, M. (2020). Peran etika profesi dalam penguatan tata kelola proyek konstruksi. *Jurnal Profesional Teknik*, 5(2), 77–86.
- Haryanto, P. (2019). Konstruksi sebagai sektor rawan korupsi: Perspektif kebijakan dan pencegahan. *Jurnal Hukum & Pembangunan Nasional*, 11(2), 101–116.
- Hasan, Z., Marsela, H. D., Septiani, J., & Ivander, D. (2025). *Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA), 2(6), 329–335.
- Kementerian PUPR. (2019). *Pedoman pencegahan korupsi pada sektor infrastruktur*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
- Lestari, S., & Widodo, T. (2022). Analisis pola korupsi pada proyek konstruksi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Konstruksi dan Infrastruktur*, 4(2), 55–66.
- Ma'arif, S. (2021). Pancasila sebagai dasar etika pembangunan nasional. *Jurnal Filsafat dan Ideologi Bangsa*, 3(1), 23–33.
- Prabowo, T. J. W. (2018). Root causes of construction sector corruption: A systematic review. *Journal of Construction Ethics*, 2(1), 15–28.
- Prasetya, E., & Kurniawan, B. (2022). Peran pengawasan berlapis dalam mencegah penyelewengan pada proyek konstruksi. *Jurnal Manajemen Proyek Indonesia*, 7(1), 34–44.
- Puji Wahyumi, P., dkk. (2024). *Korupsi mendegradasikan nilai etika Pancasila*. Bangun Rekaprima, 10(1), 98–108.
- Putri, A. R., & Sari, N. (2020). Persepsi mahasiswa teknik sipil terhadap nilai integritas dan antikorupsi. *Jurnal Pendidikan Teknik*, 9(2), 104–115.
- Sari, N., Rahman, T., & Putra, D. (2021). *A systematic review of global corruption in construction projects*. Sustainability, 13, 4400.
- Siregar, R. (2021). Kolusi dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 88–97.
- Siregar, R., & Widodo, A. (2017). *Characteristics and impact of corruption in construction projects in Indonesia*. MATEC Web of Conferences, SICEST 2017, 05018.
- Susanto, Y. (2019). Penguatan karakter mahasiswa teknik berbasis nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Karakter Bangsa*, 6(1), 41–53.
- Transparency International. (2020). *Global Corruption Report: Infrastructure*. Berlin: Transparency International.